



POLICY BRIEF

Percepatan Implementasi Satu Data untuk Mewujudkan Transformasi Pemerintahan di Indonesia

Rahmat Trialih

Ketua Komisi Teknologi PPI Dunia 2021-2022
University College Cork, Ireland

Aldi Cahya Muhammad

Anggota Komisi Teknologi PPI Dunia 2021-2022
Islamic University of Technology, Bangladesh

Ringkasan

Dewasa ini, efisiensi pelayanan publik sangat diperlukan. Beberapa metode untuk menyasiasi terwujudnya hal tersebut ialah perlunya pengembangan pemanfaatan *big data*. Pemanfaatan teknologi ini mendatangkan solusi dari kompleksitas dari masalah inefisiensi di berbagai sektor pemerintahan, seperti pelayanan kesehatan, perpajakan, pendidikan dan lain-lain. Pembangunan model pemerintahan digital berbasis data perlu dipercepat. Implementasi data digital sangat membantu keterbatasan dari pelayanan publik. Untuk itu, saling berbagi informasi melalui sebuah *database* terpusat merupakan hal yang prioritas demi terwujudnya implementasi satu data di dalam pemerintahan. Indonesia telah memiliki payung hukum terkait, yaitu Perpres No. 39 tahun 2019 terkait dengan Satu Data Indonesia. Ini merupakan titik acuan demi terwujudnya implementasi satu data. Ditambah lagi, Indonesia sendiri telah memiliki sebuah fondasi dalam membangun satu data, yaitu nomor induk kependudukan dan E-KTP. *Policy brief* yang disusun ini diharap memberi rekomendasi kontribusi secara khusus di sektor pemerintahan untuk implementasi satu data dalam rangka menambah efisiensi kinerja.

Silakan kutip karya ini sebagai:

Trialih R & Muhammad AC. *Policy Brief: Percepatan Implementasi Satu Data untuk Mewujudkan Transformasi Pemerintahan di Indonesia*. No. 7. 2022. <https://ppi.id/policy-brief-satu-data-transformasi-indonesia>

PENDAHULUAN

Di akhir abad 19, teknologi berkembang secara masif dan cepat. Era ini dimulai tatkala revolusi industri 4.0 dicanangkan oleh berbagai kalangan dan saat ini *big data* telah menjadi salah satu capaian dari perwujudan industri 4.0 tersebut. Dalam pemanfaatan awalnya, *big data* digunakan di lingkungan bisnis dengan kombinasi dari data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Dari data inilah, sebuah informasi dapat dihasilkan dan menghasilkan banyak manfaat bagi penggunaannya. Melihat perkembangan ini, maka dapat dikatakan bahwa data menjadi semakin penting untuk pemecahan masalah. Sementara itu, pemanfaatan data tidak hanya bisa digunakan oleh pelaku bisnis namun juga untuk pemerintahan. Pemerintah perlu untuk mencari cara untuk meningkatkan *data sharing* dengan baik dan ideal sehingga dapat menambah *value* lebih besar dan menghemat waktu, uang, dan bahkan nyawa.

Saat ini data menjadi penting untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ketika pemerintah berubah menjadi organisasi yang lebih didorong oleh *knowledge*, maka proses di dalam pemerintahan pun akan menjadi lebih lancar baik dalam kemampuan pelayanan, proses yang lebih cepat, serta arah kebijakan yang lebih tepat. Intinya, terletak pada kemampuan pemerintah untuk mendapatkan, memanfaatkan, dan mengolah data secara tepat guna. Terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia adalah contoh utama dari bagaimana pentingnya data untuk mengakomodasi kebijakan yang tepat dan bermanfaat secara luas. Saat pandemi terjadi, pemerintah dituntut untuk membagikan data secara global. Hal ini tentu berguna bagi setiap negara tetangga ataupun World Health Organization (WHO)

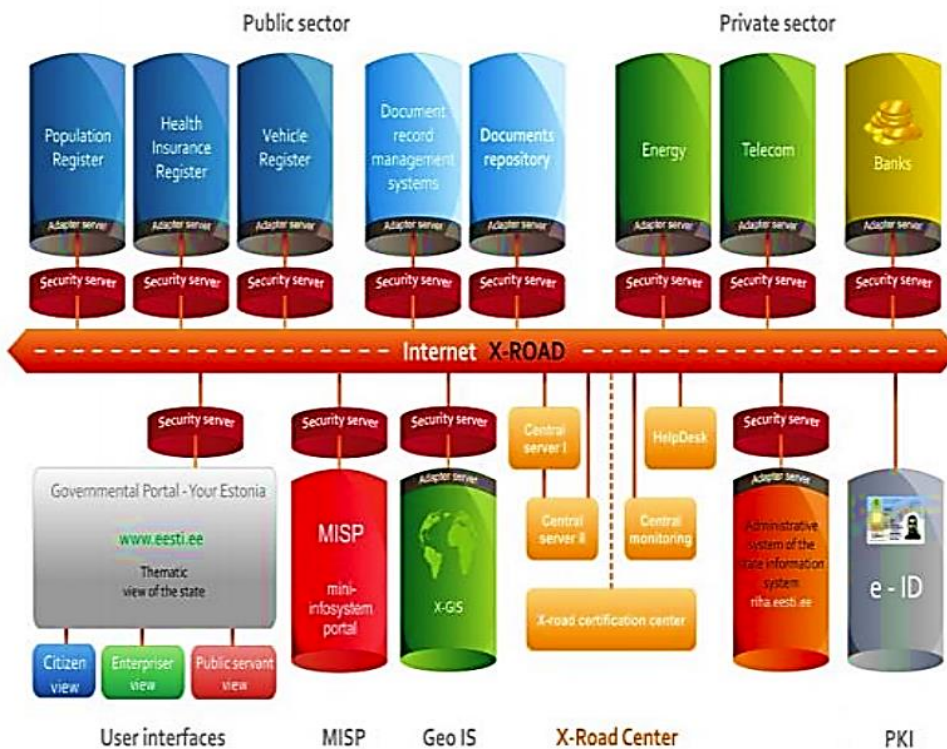
untuk menganalisis perkembangan COVID-19 kala itu. Tindakan ini membantu hubungan antar negara untuk melakukan pelacakan terhadap kasus COVID-19 yang terjadi sehingga memungkinkan adanya langkah pencegahan di kemudian hari. Contoh lain adalah Uni Eropa yang menyiapkan sebuah *gateway interoperability* di seluruh wilayah sehingga dapat memungkinkan pertukaran informasi yang aman antara berbagai aplikasi pelacakan COVID-19, hingga Institut Kesehatan Nasional AS yang membangun sebuah repositori terpusat dari catatan kesehatan COVID-19 untuk memfasilitasi penelitian dan penemuan. Contoh ini menunjukkan bahwa *data sharing* terbukti berperan dalam respon pandemi sektor publik.

Pembangunan model pemerintahan digital berbasis data bukanlah hal baru dan telah dipelopori oleh Estonia. Negara tersebut menggambarkan bagaimana pemerintah dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memberikan layanan. Negara telah menemukan cara untuk memudahkan warga melakukan hal-hal sederhana secara *online* seperti mendaftarkan mobil atau memperbarui paspor. Namun, perlu disadari bahwa banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan hal ini, salah satunya

dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di dalamnya. Selain itu, faktor skalabilitas dan fleksibilitas sistem juga memberikan perbedaan dari cara biasa yang ditawarkan pemerintah untuk jenis layanan ini^{1,2}.

Dalam sistem informasi pemerintahan yang banyak diadopsi sekarang, setiap layanan *online* selalu dikembangkan oleh masing-masing departemen. Hal ini dapat membuat terjadinya duplikasi sistem atau data di setiap lingkungan departemen masing-masing dan akan menutup peluang efisiensi akibat adanya biaya pengeluaran yang lebih mahal dari seharusnya. Sebaliknya, Estonia dan India menggunakan sebuah sistem standar yang memungkinkan tiap departemen dan lembaga saling berbagi informasi melalui sebuah *database* terpusat sehingga sistem dapat saling terhubung satu sama lain agar dapat mewujudkan sebuah layanan baru yang lebih cepat dan murah. Pendekatan baru ini merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan perangkat inti dan *database online* secara bersama dan dimanfaatkan oleh seluruh lini pemerintah, dikenal dengan istilah *digital platform government*. **Gambar 1** akan menggambarkan bagaimana Estonia mendesain sistem informasi terpusat mereka.

Estonian information system



Gambar 1 Sistem informatika di Estonia³

Dalam sistem informasi pemerintahan yang banyak diadopsi sekarang, setiap layanan *online* selalu dikembangkan oleh masing-masing departemen. Hal ini dapat membuat terjadinya duplikasi sistem atau data di setiap lingkungan departemen dan menutup peluang efisiensi akibat adanya biaya pengeluaran yang lebih mahal dari seharusnya. Sebaliknya, Estonia dan India menggunakan sebuah sistem standar yang memungkinkan tiap departemen dan lembaga saling berbagi informasi melalui sebuah *database* terpusat sehingga sistem dapat saling terhubung satu sama lain agar dapat mewujudkan sebuah layanan baru yang lebih cepat dan murah. Pendekatan baru ini merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan perangkat inti dan *database online* secara bersama dan dimanfaatkan oleh seluruh lini pemerintah, dikenal dengan istilah *digital platform government*. **Gambar 1** akan menggambarkan bagaimana Estonia mendesain sistem informasi terpusat mereka.

Berkaca dari tindakan yang telah dilakukan Estonia, maka transformasi digital di sektor pemerintahan melalui satu data dapat menjadi solusi jangka panjang di seluruh sektor Indonesia. Oleh karena itu, inilah saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali di mana pemerintahan digital saat ini, melihat pendekatan digital baru apa yang muncul, dan melihat lebih dekat bagaimana satu negara, seperti Estonia, telah menemukan keuntungan besar dalam mengadopsi pendekatan semacam itu, sehingga Indonesia dapat mengadopsi dan mengikuti arah pengembangan yang baik ke depan.

KONDISI SATU DATA DI INDONESIA

Saat ini, Indonesia sudah berada di jalur yang benar dengan dibuatnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 tahun 2019 terkait dengan Satu Data Indonesia. Dalam aturan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya satu data untuk kepentingan negara ke depannya. Peraturan ini menjadi acuan untuk mengembangkan sebuah portal satu data. Dalam aturan ini juga tertulis bahwa Indonesia telah membagi pemangku kepentingan menjadi empat, yaitu pembina data, wali data, produsen data, dan pengguna data⁴.

Satu Data Indonesia saat ini sedang merancang Rencana Aksi Satu Data Indonesia (Renaksi SDI), untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan terkait implementasi Satu Data Indonesia⁵. Rencana ini nantinya akan diterapkan oleh instansi pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan undang-undang terkait. Dijelaskan bahwa dalam rencana ini akan memiliki 6 program kerja, yaitu implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip SDI, perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan SDI, pengembangan infrastruktur dalam platform data serta fasilitas analitik data, penguatan SDM penyelenggara SDI dan partisipasi publik, stimulasi dan dorongan percepatan SDI, serta pemanfaatan data dalam mendukung agenda Pembangunan Nasional. **Gambar 2** merupakan gambaran konsep yang sudah dirancang dan ingin dicapai di masa depan.



Gambar 2 Konsep Satu Data Indonesia



Sejatinya, Indonesia sendiri telah memiliki sebuah fondasi dalam membangun satu data dan fondasi ini telah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yaitu nomor induk kependudukan dan elektronik kartu tanda penduduk (E-KTP). E-KTP ini dibangun sebagai langkah awal untuk tahapan *Go Digital* dan berguna untuk mempercepat implementasi satu data. Ironisnya, E-KTP yang seharusnya dapat memotong proses bisnis di dalam pelayanan pemerintahan menjadi lebih ramping justru hanya menjadi sebuah simbol yang tidak diikuti dengan perbaikan sistem. Sebagai contoh, masih diperlukannya E-KTP untuk difotokopi, padahal dengan data yang terkandung, langkah ini tidak diperlukan lagi.

Dalam hal ini, terdapat inkonsistensi pada tujuan dan potensi pemberdayaan E-KTP. Aturan antara atas dan bawah tidak terjalin dengan baik menyebabkan adanya inkonsistensi proses dari apa yang seharusnya dilakukan⁶. Selain itu, terdapat permasalahan dalam budaya kerja sehingga perlu upaya untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM dengan budaya kerja organisasi yang terstruktur, disiplin, dan kekeluargaan dengan saling membantu apabila terdapat masalah terhadap pelayanan masyarakat⁷.

SATU DATA – KESENJANGAN IDE DENGAN REALITA

Dengan satu data, bahkan dengan kondisi satu data yang ada sekarang, seharusnya negara memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, penerapan MyPertamina untuk pembelian bensin bersubsidi. Tujuan dari penerapan MyPertamina untuk pembelian bensin adalah baik yaitu untuk mewujudkan subsidi yang tepat sasaran. Namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan, mengapa kita tidak menggunakan potensi satu data yang kita miliki untuk mengklasifikasikan mana yang layak mendapat subsidi ataupun tidak.

Dalam penggunaannya, diketahui bahwa setiap pengguna MyPertamina diperlukan untuk mendaftar dengan memasukkan data mereka. Penerapan aturan ini dapat menimbulkan permasalahan data *silo* baru yang seharusnya ingin dihilangkan melalui aturan satu data. Namun, pada kenyataannya budaya ini terus dibiarkan dan menyebabkan efisiensi tidak terpenuhi dengan efektivitas yang juga belum diketahui^{8,9}.

Di sisi lain, langkah satu data juga sudah berada di jalan yang benar dengan adanya ide untuk penggabungan NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembangunan ini akan membantu penduduk serta pelayanan pajak dalam melakukan dan memudahkan pendataan wajib data di Indonesia^{10,11}. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep yang sudah dibuat dengan realita yang terjadi di lapangan. Konsep sudah dibuat dengan baik namun masih diperlukan perbaikan supaya optimal.

POTENSI SATU DATA

Pondasi satu data Indonesia sejatinya telah terlihat dan dibuktikan dengan kebijakan, peraturan, hingga konsep yang telah dibangun. Namun, permasalahan integrasi dengan ide-ide kreatif yang tidak memanfaatkan atau menambah beban dapat menjadi penghambat dalam perwujudan satu data tersebut.

Berdasarkan pernyataan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Kebijakan Satu Data Indonesia berperan penting dalam menyokong pemerintah dalam menyelaraskan isu-isu statistik sehingga perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah¹². Dengan adanya satu data Indonesia, maka sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berjalan beriringan. Nantinya, melalui satu data maka kita dapat menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Selain itu, pemanfaatan data pemerintah nantinya tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat¹³. *Silo* ini cenderung terjadi karena setiap departemen dalam suatu organisasi memiliki prioritas, tanggung jawab, dan tolok ukur yang berbeda. Keberadaan *silo* data sering kali dapat menimbulkan masalah.

Dengan menerapkan satu data, kita dapat mengeliminasi data *silo*. Secara umum, semakin banyak data yang dapat dibagikan maka semakin baik kemampuannya untuk membuat rencana dan bergerak maju dengan tujuannya. Keberadaan *silo* data dapat menghambat gagasan ini karena *silo* data menghambat arus informasi yang bebas. *Silo* cenderung terjadi karena setiap departemen dalam suatu organisasi memiliki prioritas, tanggung jawab, dan tolok ukur yang berbeda. Keberadaan *silo* data dapat menimbulkan masalah bagi organisasi karena menyebabkan proliferasi titik data yang berbeda dan mengakibatkan ketidakjelasan data mana yang lebih akurat dan terkini¹⁴.

Satu data juga dapat meningkatkan *Data Governance*. *Data governance* terbentuk untuk mengatur pembuatan, evaluasi, dan penggunaan data di dalam suatu lingkungan organisasi, dan berusaha untuk menjaga interaksi data yang aman di semua tingkat organisasi. Dengan hal ini, maka penggunaan data

menjadi lebih aman dan dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan analisis. Dalam sektor pemerintahan perlu dipahami bahwa data merupakan aset dan layak untuk diinvestasikan. Hal ini terjadi karena data dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang lebih tepat dan memberikan peluang untuk berkembang di masa depan. Dalam menghasilkan kebijakan yang tepat ini, diperlukan sebuah manajemen data yang terkait langsung dengan kualitas data yang tersedia. Pengimplementasian satu data akan berkaitan erat dengan hal tersebut.

REKOMENDASI

Menilik pada potensi satu data yang telah disebutkan tersebut, kami melihat bahwa percepatan satu data Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan terbuka bagi siapa saja. Oleh karena itu kami memiliki rekomendasi dalam *policy brief* ini yaitu:

1. Transisi untuk menyelaraskan proses bisnis atas dan bawah sangat diperlukan. Hal ini sangat penting untuk membangun pelayanan yang baik dan mencegah adanya *redundansi*. Kondisi saat ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara proses yang ada di tingkat atas dengan poses yang ada di tingkat operasional. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, diperlukan upaya dari pendesain untuk menangkap seluruh proses inti di setiap lini.
2. Pemanfaatan data penduduk yang tersimpan di dalam E-KTP sebagai fondasi pembangunan data kependudukan nasional. Dengan pemanfaatan data E-KTP yang ada, pengguna data kependudukan tidak perlu lagi meminta data dari penduduk yang bersangkutan. Hal ini dapat menjadi fondasi awal dari teknologi pendekatan big data serta berguna untuk restrukturisasi pelayanan seperti di Kesehatan, pajak, dan pemberian bantuan.
3. Perlindungan data dan informasi dari kependudukan untuk mencegah adanya kebocoran data.
4. Fokus pembangunan sistem secara menyeluruh yang bermaksud agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan perangkat keras. Namun juga perlu diseimbangkan dengan pengembangan proses dan sumber daya manusia.

Referensi

1. OECD. Case Study 8: Estonia e-government and the creation of a comprehensive data infrastructure for public services and agriculture policies implementation. *Digital Opportunities for Better Agricultural Policies*. 2019:207-213. doi:10.1787/510A82B5-EN
2. Hesteren D van., Weyzen Raymonde, Knippenberg L van.,

Publications Office of the European Union., European Data Portal. *Open Data Best Practices in Europe : Estonia, Slovenia and Ukraine*. 2022.

3. Kitsing M. The janus-faced approach to governance: A mismatch between public sector reforms and digital government in Estonia. *ACM International Conference Proceeding Series. Association for Computing Machinery*. 2018:59-68. doi:10.1145/3209415.3209453
4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. SATU DATA INDONESIA. 2019.
5. *Satu Data Portal*. Accessed July 4, 2022. <https://data.go.id/berita/105>
6. Tangkilisan W, Saragih BR, Budi HS, Supriadi T. Inconsistency of Misusing Electronic Identity Card (E-KTP) Data in General Elections in Indonesia. *UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA*. 2021. doi:10.5281/zenodo.4556199
7. Ningrum AP. Analisis Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan E-KTP. *Indonesian Journal of Public Policy Review*. 2022;18. doi:10.21070/ijppr.v18i0.1223
8. Burhan FA. *Ahli IT Pertanyakan Keamanan Data Aplikasi MyPertamina*. 1 Juli 2022. Diakses 4 Juli 2022. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/62beb2b634143/a-hli-it-pertanyakan-keamanan-data-aplikasi-mypertamina>
9. Putri RS, Hidayat AAN. *Ekonom Usul Aplikasi MyPertamina Terkoneksi dengan Data Kemensos agar Subsidi Tepat Sasaran*. 2 Juli 2022. Diakses 4 Juli 2022. https://bisnis.tempo.co/read/1607887/ekonom-usul-aplikasi-mypertamina-terkoneksi-dengan-data-kemensos-agar-subsidi-tepat-sasaran?page_num=2
10. Anggela NL. *Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil Perkuat Integrasi Satu Data Indonesia*. 22 Mei 2022. Diakses 4 Juli 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220520/259/1535140/ditjen-n-pajak-dan-ditjen-dukcapil-perkuat-integrasi-satu-data-indonesia>
11. Sembiring LJ. *NPWP Bakal Digabung NIK, Kapan Dimulainya?* *CNBC Indonesia*. 21 Desember 2021. Diakses 4 Juli 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211221122416-4-300889/npwp-bakal-digabung-nik-kapan-dimulainya>
12. *Dari Webinar Satu Data Indonesia SDI, Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa, SDI untuk Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik*. Diakses 4 Juli 2022. <https://rokanhulukab.go.id/detailpost/dari-webinar-satu-data-indonesia-sdi-menteri-ppn-bappenas-ri-suharso-monoarfa-sdi-untuk-sinergi-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-berbasis-elektronik>
13. Nursaid FA. *Peran Penting Satu Data Indonesia Pada Big Data Pemerintah*. 3 January 2022. Diakses 4 Juli 2022. <https://www.komite.id/2022/01/03/peran-penting-satu-data-indonesia-pada-big-data-pemerintah/>
14. Diligent.io. *The Benefits of Centralized Data: A Single Source of Information for Your Business Entities*. 2018. Diakses 4 Juli 2022. <https://www.diligent.com/insights/data-management/the-benefits-of-centralized-data-a-single-source-of-information-for-your-business-entities/>

© 2022 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License